



## Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Nasional Lumbung Ikan Nasional (LIN) Di Kepulauan Aru, Propinsi Maluku

Hendri D. Hahury<sup>1</sup>, Max R. Wenno<sup>2</sup>, Johanes M. S. Tetelepta<sup>3</sup>, Billy J. Camerling<sup>4</sup>, Febryano Saptanno<sup>5</sup>, Fredy Louhenapessy<sup>6</sup>, Revi W. Silooy<sup>7</sup>, Hermi Oppier<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Universitas Pattimura

### ABSTRACT

POVERTY ALLEVIATION EFFORTS THROUGH THE NATIONAL FISH BARN PROGRAM IN ARU ISLANDS, MALUKU PROVINCE. The potential of abundant fishery resources is expected to be one way to overcome poverty, especially for the coastal communities, mainly those living in archipelagic areas. However, in Aru Islands, Maluku Province, there is an inverse comparison. Although they have the potential of abundant fishery resources, to this date, the local community are still living in poverty. This community service is expected to be an effort to alleviate poverty through the National Fish Barn (Lumbung Ikan Nasional (LIN)). The method used was a combination of socialization and assistance for fishermen in Karangguli Village, Wokam Village and Jabulenga Village. The results are in the form of identification of problems faced by the fishermen, solutions and potentials of the fishery sector through the National Fish Barn program as a way to overcome the poverty. The fishermen were still struggling with the poverty although they lived close to the abundant fishery resources. The presence of National Fish Barn in Maluku, including in the Aru Islands, is expected to side with the community so that they can improve their level of welfare.

**Keywords:** Islands, National Fish Barn (Lumbung Ikan Nasional (LIN)), Poverty.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
21.07.2022	11.08.2022	22.08.2022	31.08.2022

### Suggested citation:

Hahury, H. D., Wenno, M. R., Tetelepta, J. M. S., Sptanno, F., Louhenapessy, F., Silooy, W. R., oppier, H., & Camerling, B. J. (2022). Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Nasional Lumbung Ikan Nasional (Lin) di Kepulauan Aru, Propinsi Maluku. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 679-689. DOI: 10.30653/002.202273.177

Open Access | URL: <http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/>

<sup>6</sup> Corresponding Author: Jurusan Ekonomi Pembangunan, FEB Universitas Pattimura, Ambon; Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka-Ambon; Email: [louhenapessy.fredy@gmail.com](mailto:louhenapessy.fredy@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kepemilikan potensi sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor perikanan bukanlah sebuah jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar sumber daya perikanan tersebut akan sejahtera. Memang diakui terdapat banyak keterbatasan yang dialami masyarakat nelayan dalam mengembangkan usaha perikananannya, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Kenyataan ini tergambar pada kondisi masyarakat nelayan di kepulauan Aru yang memiliki potensi sektor perikanan yang melimpah namun hingga saat ini pun masyarakatnya masih terus bergelut dengan kemiskinan yang mereka alami. Padahal sektor perikanan diyakini memiliki potensi sebagai jalan keluar dalam mengatasi kemiskinan (Gumilar & Nuryasin, 2022; Ismail, et al., 2021; Adilah & Cikusin, 2022).

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah kepulauan dengan pulau-pulau berbagai ukuran dengan jumlah pulau sebanyak 547 buah pulau, dimana sekitar 89 pulau berpenghuni, dan sisanya tidak dihuni oleh penduduk. Berdasarkan klasifikasi pulau, terdapat 5 (lima) buah pulau yang berukuran relatif besar di Kabupaten Kepulauan Aru yakni Pulau Wokam, Kobror, Maekor, Trangan, dan Kota Dobo sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Aru berada di Pulau Wamar. Kabupaten kepulauan Aru memiliki 10 Kecamatan yang membawahi 117 desa induk, 14 anak desa/ dusun dan 2 kelurahan. Sebagai daerah kepulauan, kabupaten Kepulauan Aru memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah khususnya pada bidang kelautan dan perikanan. Komoditi perikanan Kabupaten Kepulauan Aru terdiri atas komoditi ikan dan non ikan. Sebagai wilayah yang ditopang oleh perairan Arafura sebagai salah satu WPP penghasil ikan di Indonesia, tentunya menyimpan potensi besar bagi keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia, sehingga perlu dikembangkan potensinya bagi kesejahteraan penduduknya.

Pemanfaatan hasil laut dari proses penangkapan maupun budidaya perikanan sudah dilakukan sejak lama, namun sampai saat ini nelayan dan pembudidaya di Maluku masih saja miskin. Badan Pusat Statistik (BPS), (2022) merilis data bahwa, Maluku masih menempati peringkat ke-4 sebagai provinsi termiskin di Indonesia dengan total jumlah penduduk miskin sekitar 17,99%. Perkembangan 3 tahun memperlihatkan adanya trend penurunan angka kemiskinan. Namun sejak Maret 2020 seiring dengan merebaknya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terjadi perubahan persentasi kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 0,55 satuan atau sekitar 4.220 orang.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam program pemberdayaan (Fattach, et al., 2021; Sumargo & Simanjuntak, 2019; Bahri & Prasetyo, 2020; Wahyudi, 2012). Bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya, pemerintah daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi telah melakukan implementasi program strategis berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat nelayan/pembudidaya seperti penyediaan peralatan tangkap (Jamilah & Mawardati, 2019; Tanzil, 2019), penyediaan bibit ikan/rumput laut (Syukur % Khaerudin, 2019; Nurwidodo, et al., 2018; Anugerah, et al., 2016), maupun penyediaan infrastruktur (Adawiyah, et al., 2021; Taib & Umar, 2019). Namun upaya-

upaya tersebut belum memberikan dampak yang nyata bagi penurunan angka kemiskinan.

Untuk lebih memaksimalkan upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang tinggi di Provinsi Maluku, maka pemerintah daerah terus berupaya melakukan koordinasi dan negosiasi dengan pemerintah pusat. Terutama terkait kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tersedia agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Maluku. Untuk itu, pemerintah pusat melalui program strategis nasionalnya telah mencanangkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Orientasi penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional adalah untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan secara modern dan berkelanjutan sehingga memberikan jaminan bagi pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya.

Namun, kekuatiran pun muncul sebagaimana yang dikemukakan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bahwa proyek LIN akan diarahkan untuk industrialisasi perikanan skala besar yang berpotensi menggeserkan atau memarginalkan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil yang jumlahnya mencapai 163.441 orang, sehingga mereka akan menjadi penonton di negerinya sendiri. Merujuk pada kondisi di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah program Lumbung Ikan Nasional mampu menurunkan angka kemiskinan di Maluku dan kepulauan Aru melalui peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya? Bagaimana peranan Lumbung Ikan Nasional dalam menurunkan tingkat kemiskinan nelayan dan pembudidaya di Maluku?

Dengan demikian, maka perlu dilakukan berbagai strategi untuk mempersiapkan masyarakat menyambut Program Pemerintah menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi program Lumbung Ikan Nasional kepada masyarakat Maluku, khususnya di kabupaten Kepulauan Aru. Dengan demikian, maka tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk menyampaikan berbagai informasi terkait sumberdaya perikanan dan upaya pengentasan kemiskinan melalui program Lumbung Ikan Nasional.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru dengan lokasi kantor Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Aru dan Desa sasaran antara lain; Desa Karangguli, Desa Wokam dan Desa Jabulenga pada bulan September 2021. Adapun yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian ini adalah nelayan, pengusaha perikanan, pengumpul hasil perikanan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan yang berjumlah 22 orang. Para peserta ini merupakan masyarakat yang menggantungkan penghidupan mereka dari sektor perikanan akan tetapi dalam keseharian aktifitasnya mereka sering diperhadapkan dengan keterbatasan informasi dalam mengelola maupun mendistribusikan hasil-hasil perikanan. Keterbatasan inilah yang menjadi "barrier" bagi nelayan dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kegiatan pengabdian ini juga dihadiri oleh tim pengabdian dari universitas Pattimura dan dinas terkait di kabupaten Kepulauan Aru.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini merupakan metode kombinasi antara pendidikan masyarakat yang berisi penyuluhan atau sosialisasi berupa *focus group discussion* (FGD) dan pendampingan terhadap masyarakat nelayan yang menggantungkan penghidupan rumah tangganya dari sektor perikanan. Evaluasi pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan kriteria, pertama; pelaksanaan kegiatan untuk 22 orang peserta dan kedua; pendampingan kepada nelayan di tiga desa sasaran, antara lain; Desa Karangguli, Desa Wokam dan Desa Jabulenga. Adapun indikator pencapaian kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah keberhasilan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan.

Materi pengabdian pada masyarakat ini disesuaikan dengan tema kegiatan pengabdian dan penelitian antara Bapeda Maluku dan LPPM Universitas Pattimura. Tema kegiatan tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program nasional Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Kepulauan Aru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah kepulauan dengan pulau-pulau berbagai ukuran dengan jumlah pulau sebanyak 547 buah pulau, dimana sekitar 89 pulau berpenghuni, dan sisanya tidak dihuni oleh penduduk. Berdasarkan klasifikasi pulau, terdapat 5 (lima) buah pulau yang berukuran relatif besar di Kabupaten Kepulauan Aru yakni Pulau Wokam, Kobror, Maekor, Trangan, dan Kota. Dobo sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Aru berada di Pulau Wamar. Kabupaten kepulauan Aru memiliki 10 Kecamatan yang membawahi 117 desa induk, 14 anak desa/dusun dan 2 kelurahan. Data Badan Pusat Statistik Kepulauan Aru tahun 2022 memperlihatkan jumlah penduduk Kepulauan Aru sebesar 102.920 jiwa dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 25.110 jiwa atau 26,53 persen dari total penduduk Kepulauan Aru.

### Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan pada Kabupaten Kepulauan Aru dengan lokasi kegiatan di kantor Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, dalam beberapa tahap kegiatan. Tahap awal, merupakan tahap persiapan kegiatan. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat dan memetakan kondisi masyarakat nelayan di Kepulauan Aru yang meliputi beberapa desa, antara lain; Desa Karangguli, Desa Wokam dan Desa Jabulenga untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat nelayan serta potensi sektor perikanan yang dimiliki. Akses transportasi yang dimiliki masyarakat di Kepulauan Aru sebagian besar merupakan perahu bermotor yang digunakan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan Kota Dobo dan pulaa-pulau di sekitarnya, seperti yang diperlihatkan pada gambar survey pendahuluan tim pengabdi di bawah ini.



**Gambar 2. Sarana transportasi masyarakat yang digunakan tim dalam survey pendahuluan**

Hasil identifikasi permasalahan yang umumnya dihadapi masyarakat nelayan tersebut adalah adanya aturan-aturan perikanan yang dikeluarkan pemerintah yang justru menyulitkan masyarakat dan membelenggu aktifitas mata pencahariannya sebagai nelayan. Disamping itu juga terdapat aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan kapal-kapal besar (milik perusahaan) di area yang dekat dengan daerah pantai. Dimana, aktifitas ini secara tidak langsung telah berkontribusi terhadap kehancuran terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan-ikan dasar yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi akibat jangkar kapal-kapal tersebut.

Data yang telah tim pengabdian miliki tersebut menjadi dasar dalam menentukan metode apa yang dapat digunakan, materi yang akan diberikan dan narasumber penyuluhan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikemas dengan menggunakan metode penyuluhan/ceramah dan diskusi. Adapun kegiatan ceramah dilakukan pada kantor Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 3 September 2021, pukul 10.00-13.00 wit dan diikuti oleh 22 orang. Ceramah ini diberikan dalam beberapa sesi. Sesi pertama, peserta pengabdian diberikan pemahaman terkait dampak sumber daya perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya terhadap perekonomian rumah tangga dan daerah serta pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan berbasis kewilayahaan.



**Gambar 2. Kegiatan sosialisasi pengentasan kemiskinan melalui program nasional Lumbung Ikan Nasional (LIN)**

Sesi kedua, pemateri memaparkan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) sebagai salah satu jalan keluar dalam mengatasi kemiskinan. Sesi ketiga, digunakan sebagai kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan sekaligus sebagai sarana mendapatkan masukan-masukan dari para pelaku usaha perikanan (nelayan, pengusaha pengumpul maupun pengusaha besar). Sesi keempat, merupakan tahap terakhir berupa evaluasi dengan mengumpulkan data dan informasi dari peserta pengabdian yang akan digunakan sebagai bagian dari kesimpulan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Sesi pertama, diisi pemaparan dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti dan dosen Fakultas Perikanan Unpatti. Dosen FEB Unpatti menguraikan tentang dampak sumber daya perikanan terhadap ekonomi rumah tangga dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Dalam pemaparan ini, narasumber menjelaskan dampak sumber daya alam terutama sektor perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya terhadap pendapatan rumah tangga dan daerah. Narasumber berpandangan bahwa, sektor perikanan dapat memberikan multiplier effect (efek pengganda) yang luas terhadap aktifitas ekonomi rumah tangga dan daerah. Artinya bahwa, dampak yang ditimbulkan oleh usaha perikanan akan turut mempengaruhi kegiatan perekonomian yang lainnya, misalnya timbul investasi, pengeluaran pemerintah bahkan subsidi yang dilakukan pemerintah (Muhertenti, et al., 2022). Dengan adanya investasi pada sektor perikanan, baik yang dilakukan pemerintah maupun sektor swasta akan memberikan dampak pengganda yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan maupun konsumsi masyarakat.

Sementara pemateri dari dosen Fakultas Perikanan Unpatti menjabarkan tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis kewilayahan. Dimana, propinsi Maluku sebagai wilayah LIN memiliki empat tahapan strategis, (1) Pengembangan wilayah berbasiskan pada peluang pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, (2) Potensi spesifik sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dikembangkan memiliki daya saing, (3) bagian-bagian wilayah yang akan dikembangkan didorong untuk saling bersinergi, (4) bagian wilayah dimantapkan dengan penerapan struktur pengembangan wilayah.

Pada sesi kedua, narasumber menguraikan peran program Lumbung Ikan Nasional di propinsi Maluku sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya alam unggulan nasional. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi Provinsi Maluku sebagai Lambung Ikan Nasional (LIN). Melalui pembangunan LIN, maka berbagai infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan terpadu, kawasan industri perikanan, sampai bandara internasional yang mampu membawa hasil tangkap produk perikanan di 3 WPP NRI (14, 715, 718) ke pasar internasional. Provinsi Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Dengan memiliki 1.340 pulau dan panjang garis pantai sepanjang 10.630 km, menyimpan kekayaan yang cukup beragam, dari sumberdaya ikan, hutan mangrove, padang lamun hingga terumbu karang. Potensi perikanan tangkap pada wilayah di sekitar Lumbung Ikan Nasional Provinsi Maluku terdistribusi pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, 715, dan 718. Sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi (MSY),

Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan SDI di WPP-NRI, ketiga WPP-RI ini memiliki total potensi sumberdaya ikan sebesar 4.669.030 ton/tahun, yang terdiri dari: WPP-NRI 714 sebesar 788.939 ton/tahun, WPP-NRI 715 sebesar 1.242.527 ton/tahun dan WPP-NRI 718 sebesar 2.637.564 ton/tahun. Potensi SDI yang melimpah di 3 WPP-NRI tersebut memberi kontribusi sebesar 37 % terhadap potensi SDI secara Nasional.

Program LIN adalah salah satu terobosan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan jangka panjang melalui sektor maritim. Pengembangan LIN di Maluku akan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Maluku dan sekitarnya, yang tidak hanya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan Provinsi Maluku tetapi juga dalam mencapai keseimbangan ekonomi antara kawasan timur Indonesia dan barat Indonesia. Perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya alam unggulan nasional. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Melalui pembangunan LIN, maka berbagai infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan terpadu, kawasan industri perikanan, sampai bandara internasional yang mampu membawa hasil tangkap produk perikanan di 3 WPP NRI (714, 715, 718) ke pasar internasional (Marves, 2021). Potensi perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715 dan 718 yang dapat diakses untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh Provinsi Maluku, diestimasi mencapai 3,055 juta ton per tahun atau sekitar 30,76% dari potensi perikanan Nasional yang mencapai 9,931 juta ton per tahun (KepMen KP No.47 Tahun 2016). Kondisi riil ini menjadi salah satu alasan Propinsi Maluku berpotensi untuk menjadi Lumbung Ikan Nasional. Penetapan Maluku sebagai LIN didasarkan pada berbagai pertimbangan akan potensi wilayah perairan Maluku, seperti; wilayah perairan Maluku dilalui oleh Arus Lintas Indonesia (Arlindo) dan merupakan daerah upwelling yang subur (M. Hasanudin, 1998).

Kondisi tersebut membuat perairan Maluku kaya akan sumber daya perikanan. Namun demikian, hasil produksi perikanan Provinsi Maluku saat ini dinilai belum optimal; terdapat tiga lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di wilayah Maluku. Dari total sebelas WPP di Indonesia, tiga diantaranya terdapat di wilayah perairan Maluku, yaitu WPP 714 – Laut Banda, WPP 715 – Laut Seram, dan WPP 718 – Laut Arafuru. Ketiga lokasi ini sering disebut sebagai golden fishing ground, dengan potensi total perikanan sebesar 4,67 juta ton per tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021), realisasi dukungan kebijakan nasional sebagai implementasi awal dalam pengembangan LIN. Salah satu dukungan tersebut adalah pembangunan pelabuhan terpadu yaitu Pelabuhan Ambon Baru. Pembangunan pelabuhan terpadu dibutuhkan karena pengelolaan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku menerapkan sistem gugus pulau yang terdiri dari 12 pulau.

Pengelolaan LIN yang harus dilakukan secara berkelanjutan memberikan konsekuensi terhadap adanya kebutuhan terhadap suatu konsep prinsip pengelolaan yang baik. Oleh sebab itu, sangat penting untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang mendasari pengelolaan LIN. Rumusan ini menghendaki adanya 11 prinsip umum:

- Transparan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mendukung pengelolaan LIN;

- Memiliki struktur organisasi pengelola yang efisien dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan dikelola secara professional;
- Kejelasan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing komponen pengelola untuk menjamin sinergitas;
- Integrasi vertikal dan horisontal yang sempurna dan menjamin kelancaran dan kesinambungan pengelolaan LIN;
- Hasil pelaksanaan program LIN harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat;
- Aturan/regulasi yang ada harus dapat menjamin eksistensi Maluku sebagai LIN dalam dimensi jangka panjang;
- Dinamis dan luwes dalam mengakomodir perubahan-perubahan dalam kerangka perbaikan pengelolaan LIN;
- Output yang dihasilkan dalam bentuk produk, SDM, kawasan/lingkungan dan sebagainya, harus berkualitas dan berdaya saing;
- Mengedepankan kaidah keberlanjutan (lingkungan, sumber daya dan proses);
- Sedapat mungkin melibatkan peran aktif masyarakat, terutama dalam upaya pengembangan ekonomi lokal; serta
- Peluang pengembangan ekonomi kawasan dan masyarakat mengacu pada daya dukung berdasarkan unsur keadilan dan pemerataan.

Setelah para narasumber selesai, maka dilanjutkan dengan sesi ketiga, pada sesi ini dipergunakan sebagai sarana diskusi berupa tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan dari peserta berfokus pada beberapa permasalahan, misalnya peraturan pemerintah yang cenderung membatasi nelayan kecil, harga jual hasil tangkapan yang rendah, terbatasnya akses pasar dan kekuatiran para nelayan akan kehadiran LIN yang justru hanya berpihak pada para pengusaha semata.



**Gambar 3. Diskusi**

Setelah mendapatkan saran dari para peserta tersebut, maka tim berdiskusi untuk membuat sebuah pandangan umum terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan di Kepulauan Aru sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten dan propinsi



Maluku. Tentunya saran-saran dari masyarakat nelayan ini memiliki korelasi yang signifikan dengan program pemerintah yang menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, maka tim pengabdian selanjutnya melakukan pendampingan kepada nelayan di ketiga desa tersebut.



**Gambar 4. Pendampingan**



**Gambar 5. Pendampingan dan menuju lokasi pendampingan**

Walaupun demikian, selama proses pendampingan ini berlangsung, nelayan di ketiga desa tersebut memiliki permasalahan yang sama terkait akses mereka terhadap sumber daya perikanan yang diklaim milik masyarakat Kepulauan Aru akan tetapi dalam realitanya, nelayan seringkali diperhadapkan dengan keterbatasan dalam mengakses sumber daya perikanan yang menjadi sumber utama pendapatan mereka. Salah keterbatasan tersebut adalah terkait, aturan atau kebijakan pemerintah dalam memberi ijin penangkapan. Kondisi ini secara langsung berdampak terhadap pendapatan yang dimiliki nelayan dan pada akhirnya bermuara pada terhambatnya upaya peningkatan kesejahteraan. Disamping itu juga, antusiasme para pemuda untuk menjadi nelayan pada masing-masing desa tersebut semakin berkurang dari waktu ke waktu.

## SIMPULAN

Kepemilikan sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor perikanan bukanlah sebuah jaminan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kenyataan memperlihatkan bahwa, sumber daya perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya lebih banyak didominasi oleh para pengusaha perikanan daripada nelayan kecil. Umumnya hasil tangkap nelayan kecil dijual langsung pada pasar di kota Dobo. Adapun kondisi ini telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Terlebih lagi dengan beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan yang besar sehingga secara tidak langsung juga turut berpengaruh terhadap hasil tangkap nelayan kecil dan pada akhirnya justru membuat penghidupan masyarakat nelayan yang berada di tepi garis kemiskinan bisa saja terjerumus ke dalam kemiskinan yang jauh lebih parah. Kehadiran program pemerintah berupa Lumbung Ikan Nasional telah membuka peluang bagi masyarakat nelayan untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mereka melalui peningkatan pendapatan.

## Ucapan Terimakasih

Kegiatan pengabdian Pada Masyarakat ini terselenggara melalui dukungan pembiayaan LPPM Universitas Pattimura, Ambon dengan Nomor 532/UN13.3/LL/2021.

## REFERENSI

- Adawiyah, S.E., Hermanto, A., Yasya, W., Kristanti, R. M. C. (2021). Akses Terhadap sumber daya alam pada kemiskinan dan ketahanan pangan. *Sosio Informa*, 7(02), 172–185. [/https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664](https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664)
- Adilah, N. & Cikusin, Y. H. (2022). Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 33–43. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.502>
- Anugerah, T. V. A. H. (2016). Strategi rumah tangga nelayan dalam mengatasi kemiskinan (studi di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau). *Berkala Perikanan Terubuk*, 44(1), 104 – 119.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Maluku dalam angka*. <https://maluku.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MmE3MGM0YjRiMTRjNTE1MDc5MWJhZDRj&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWx1a3UuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMDIvMjUvMmE3MGM0YjRiMTRjNTE1MDc5MWJhZDRjL3Byb3ZpbmNpLW1hbHVrdS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIyLmh0bWw%3D&twoadfnarfeauf=MjAyMi0wNy0wNCxMTowMjoxNQ%3D%3D>
- Bahri & Prasetyo, W. (2020). Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan wirausaha dan program life skill untuk meningkatkan produktivitas kelompok UPPKS Kalipakem Baru. *Riau Journal Of Empowerment*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.31258/raje.3.1.27-37>
- Dinas Kelautan dan Perikanan. (2021). *Wilayah pengelolaan perikanan*.
- Fattach, A., Wahyuli, E.F., Syairozi, M. I. T. O. A. (2021). Rekonstruksi sosial ekonomi pengentasan kemiskinan melalui kelompok usaba bersama (Kube) penjual nasi boranan di

- Desa Sumberejo Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(2), 455–447. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/pkm.v5i2.1358>.
- Gumilar, G. H. N. (2022). Efektivitas program pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Karawang. *IDEAS*, 22(8), 1. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.612>
- Ismail, I, Gunaisah, E. M. A. U., Muhfizar, M. H. P. (2021). Pelatihan teknologi sistem informasi bagi nelayan pada masa covid-19 di era digital. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 566–574. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4487>
- Jamilah, M. (2019). Hubungan tingkat kemiskinan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap pada Kawasan Minapolitan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 3(2), 336–347. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.10>
- Marves. (2021). *Propinsi Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional*.
- Muhertenti, R. & Tampubolon, D. M. (2022). Analisis sektor ekonomi unggulan dalam pengembangan potensi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Multidisiplin Madani*, 2(5), 2375–2388. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.386>.
- M. Hasanudin. (1998). Arus Lintas Indonesia (ARLINDO). *Oseana*, 23(2), 1–9. [http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana\\_xxiii\(2\)1-9.pdf](http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xxiii(2)1-9.pdf)
- Nurwidodo, N., Rahardjanto, A., Husamah, M. (2018). Pendampingan masyarakat dalam budidaya rumput laut di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *International Journal of Community Service Learning*, 2(3), 157–166. [https://www.researchgate.net/publication/327114427\\_Pendampingan\\_Masyarakat\\_dalam\\_Budidaya\\_Rumput\\_Laut\\_di\\_Kepulauan\\_Sapeken\\_Kabupaten\\_Sumenep\\_Jawa\\_Timur](https://www.researchgate.net/publication/327114427_Pendampingan_Masyarakat_dalam_Budidaya_Rumput_Laut_di_Kepulauan_Sapeken_Kabupaten_Sumenep_Jawa_Timur)
- Syukur, A., &Khairudin, M. Y. (2019). Budidaya ramah lingkungan sebagai strategi pengentasan kemiskinan nelayan skala kecil di Desa Ketapang Raya Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 1(2), 102–106.
- Tanzil. (2019). Peranan jaringan sosial dalam penanganan kemiskinan nelayan Di Baubau. *SOSIO KONSEPSIA*, 8(02), 61–71. [/https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1485](https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1485)
- Taib, Z. & Umar, A. (2019). Analisis sosial ekonomi nelayan tradisional di daerah 3T Kabupaten Pulau Morotai. *Agriprimatech*, 3(1), 1–12. <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/Agriprimatech/article/view/779>
- Wahyudi, K. D. (2012). Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Dian Ilmu*, 11(2), 78–91.

### Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2022 Hendri D. Hahury, Max R. Wenno, Johannes M. S. Tetelepta, Billy J. Camerling, Febryano Saptanno, Fredy Louhenapessy, Revi W. Silooy, Hermi Oppier

Published by LPPM of Universitas Mathla'ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)